

**TAHUN  
2020**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



## **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Kenari No 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta

Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 514448, 515665

Website : [tataruang.jogjakota.go.id](http://tataruang.jogjakota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta. Komitmen dalam Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang seoptimal mungkin sesuai potensi dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kegiatan

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo H.P., ST. MA., MTP.  
NIP. 19720411 199803 1 007

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat

dengan indikatornya :

Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 65,59 atau tercapai sebesar 100% dari target sebesar 65,59.

b. Sasaran 2: Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.

dengan indikatornya :

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 96,65 atau tercapai sebesar 100,49% dari target sebesar 97,12.

Dalam Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendukung dan terlibat dalam Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi tanah yang sudah keluar Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakainya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1980-an (Tanah KPTS).

Untuk tanah KPTS sendiri di Kota Yogyakarta terdapat 2.570 (Dua ribu lima ratus tujuh puluh) bidang terdiri dari :

- Hak Pakai sebanyak 587 (Lima ratus delapan puluh tujuh) bidang.
- Hak Guna Bangunan sebanyak 1.982 (Seribu sembilan ratus delapan puluh dua) bidang.
- Hak Guna Bangunan (HGB) KPTS BPN sebanyak 1 (satu) bidang.

Untuk Tahun 2020 ini inventarisasi dan identifikasi akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan melibatkan BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan wilayah. Adapun jumlah yang akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk tahun ini sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) bidang.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Kuantitas SDM yang belum memadai.
2. Kesamaan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ternyata belum begitu sejalan dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Lamanya waktu proses pembahasan dan perolehan persetujuan substansi Raperda RTRW di Kementrian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Lama waktu proses pensertifikatan tanah dalam hal pensertifikatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak bisa diprediksi.
5. Lama waktu proses kekancingan tanah dalam hal pengurusan Surat Kekancingan atas aset yang digunakan oleh Pemkot berkaitan dengan KHP Wahono Sarto Kriyo tidak bisa diprediksi.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan tanah persil masyarakat.
7. Transaksi pembelian/pengadaan tanah sebagian gagal yang disebabkan oleh berbagai faktor diluar kendali kedinasan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

A. SAMPUL DEPAN.....	i	
B. KATA PENGANTAR.....	ii	
C. IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii	
D. DAFTAR ISI.....	v	
E. DAFTAR TABEL.....	vi	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Struktur Organisasi .....	1	
1.2. Fungsi dan Tugas.....	3	
1.3. Isu-isu Strategis.....	3	
1.4. Keadaan Pegawai .....	5	
1.5. Keadaan Sarana Prasarana .....	6	
1.6. Keuangan .....	8	
1.7. Sistematika LkjIP .....	8	
<b>BAB II.</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) .....	10	
2.1.1. Visi dan misi Kepala Daerah .....	10	
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	12	
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	13	
2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	17	
2.1.5. Sistem Pelaporan dan Koordinasi .....	18	
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	20	
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	23	
2.3.1. Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.....	23	
2.3.2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	23	
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	25	
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	26	
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....	42	
3.4. Capaian Kinerja Internal.....	42	
3.5. Akuntabilitas Anggaran .....	43	
3.6. Inovasi .....	48	
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	50
Lampiran-lampiran		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Menurut Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja.....	6
Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	6
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.....	11
Tabel 2.2 Sasaran Strategis.....	12
Tabel 2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.4 Program Pengaturan dan Program Pengendalian Tata Ruang.....	14
Tabel 2.5 Program Pengelolaan Pertanahan.....	14
Tabel 2.6 Program Internal.....	15
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	17
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	20
Tabel 2.9 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	21
Tabel 2.10 Program / Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.....	21
Tabel 2.11 Program / Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.....	22
Tabel 2.12 Program/Kegiatan untuk mendukung pensertifikatan tanah aset Pemkot.....	22
Tabel 2.13 Program/Kegiatan untuk mendukung Tertib administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan.....	23
Tabel 2.14 Perubahan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.....	23
Tabel 2.15 Rincian anggaran belanja langsung per sasaran strategis.....	24
Tabel 2.16 Rincian anggaran program / kegiatan internal.....	24
Tabel 3.1 Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	25
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kerja.....	26
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	26
Tabel 3.4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	27
Tabel 3.5. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel 3.6. Target dan realisasi Kinerja Indikator Sasaran.....	29
Tabel 3.7 Akuntabilitas Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	33
Tabel 3.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	35
Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	36
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja.....	39
Tabel 3.11 Akuntabilitas Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	40
Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	44
Tabel 3.13. Analisis Efisiensi.....	45
Tabel 3.14 Realisasi Keuangan per Triwulan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	46
Tabel 4.1 Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis.....	48
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1. Struktur Organisasi**

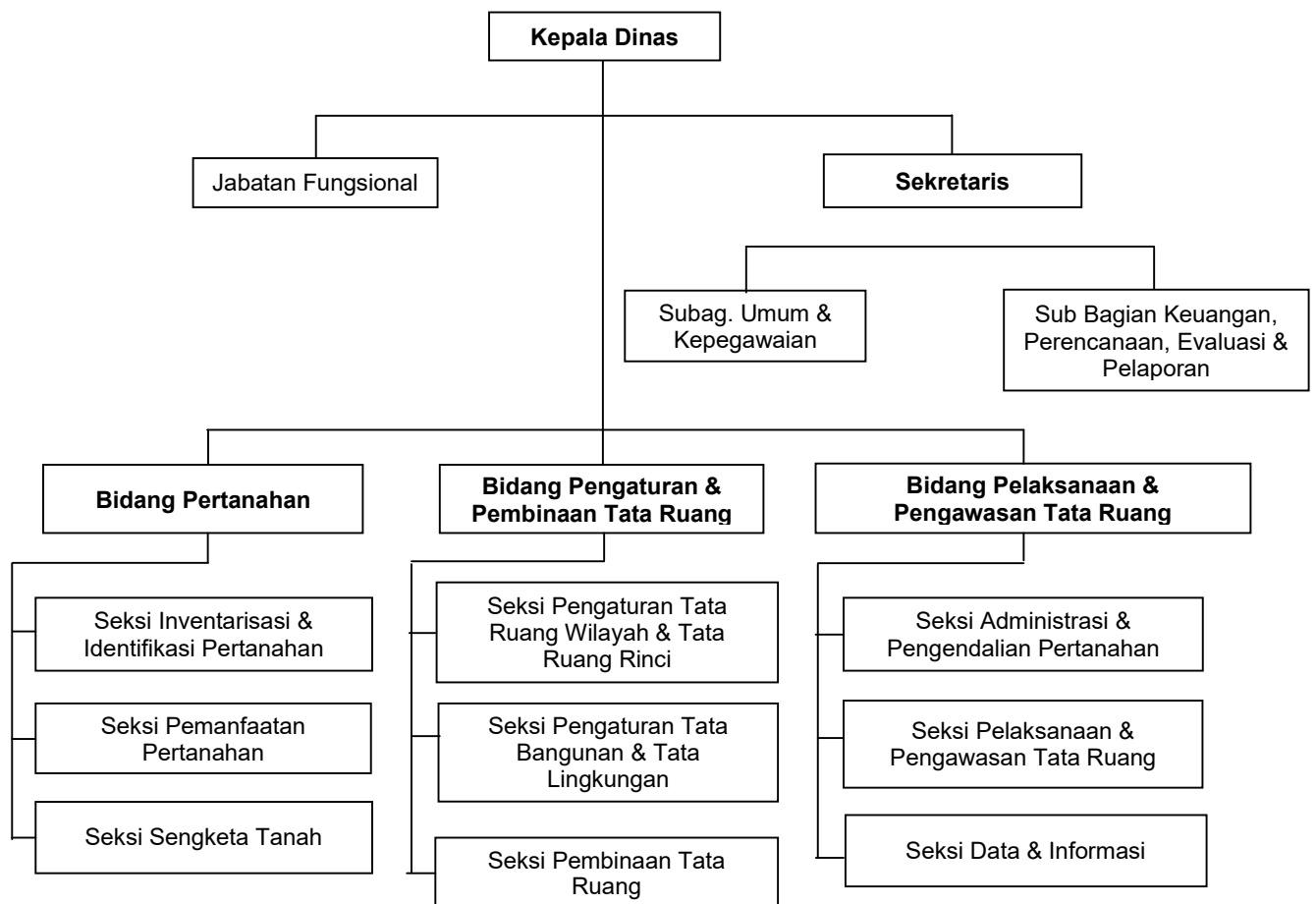
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

- c. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
  2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
  3. Seksi Sengketa Tanah.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengaturan Tata Ruang, terdiri dari :
  1. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
  2. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
  3. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari :
  1. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
  2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
  3. Seksi Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran sebagai berikut :





## 1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanahan dan tata ruang;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan dan tata ruang;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanahan dan tata ruang;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang pertanahan dan tata ruang.

## 1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena belum tersedianya regulasi dan kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pada instansi. Diperlukan instansi yang secara khusus bertanggung jawab menangani tata ruang. Hal ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang yaitu perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali. Dalam skala nasional, RPJMN tahun 2015-2019 juga mencantumkan perlunya peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui peran dan kerjasama beberapa instansi lintas sektor.

Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Peran lembaga khusus yang menangani pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan mampu fokus kepada masalah penataan ruang. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan

perkotaan yang baik dan seimbang. Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal diindikasikan dari rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai. Tersedianya lembaga khusus untuk menangani penataan ruang diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Isu strategis yang lain terkait tata ruang adalah ruang terbuka hijau dan keterbukaan tata ruang untuk pembangunan pariwisata. Alokasi 30 persen ruang terbuka hijau dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Yogyakarta dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan luasan ruang terbuka hijau yang tersedia terus meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi juga luas wilayah ber HPL/HGB terus bertambah. Keberadaan RTH bagi perencanaan pariwisata juga dapat memberikan dampak positif terkait dengan adanya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk atraksi wisata. Alokasi lahan parkir di Kota Yogyakarta bagi pariwisata maupun secara umum juga perlu dituangkan dalam tata ruang, mengingat keterbatasan area parkir saat ini yang dimiliki.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Kota Yogyakarta juga mengalami hal yang sama, dapat dilihat dari alih fungsi pemanfaatan lahan dari Taman Hiburan Rakyat (THR) dengan luas 24.690 m<sup>2</sup> yang selama ini menjadi area rekreasi warga kota, berubah pemanfaatannya menjadi ruang privat komersial yakni hotel. Ini mengakibatkan area rekreasi publik, bertemunya warga kota dari berbagai lapisan sosial semakin berkurang, sementara ruang publik yang dapat menggantikannya belum tersedia.

Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang public juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. Sarana prasaran perkotaan kurang memadai,
- c. Kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. Standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. Rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. Kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat.

#### 1.4. Keadaan Pegawai

1. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Personil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dukung oleh 35 orang karyawan yang terdiri dari : PNS 32 orang dan Tenaga Bantu (Naban) 3 orang.

Dari jumlah personil tersebut saat ini ada 1 (satu) orang yang sedang melaksanakan tugas belajar S2 (Pasca Sarjana) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

**Jumlah Pegawai Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:**

S2	: 11 orang ( 31,43 % )
S1	: 12 orang ( 34,29 % )
D III	: 2 orang ( 5,71 % )
SMA/K	: 7 orang ( 20,00 % )
Naban	: SMA: 2 orang, S1 : 1 orang

**Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Jabatan dan Pangkat/golongan adalah sebagai berikut :**

Kepala Dinas	Pembina Tingkat I/ Gol.IVb	:	1	Orang
Kepala Bidang/Sekretariat	Pembina / Gol. IVa	:	3	Orang
	Penata Tingkat I/ Gol. III d	:	1	Orang
Kepal Seksi	Pembina / Gol. IVa	:	3	Orang
	Penata Tingkat I / Gol. III d	:	3	Orang
	Penata / Gol. III c	:	3	Orang
Kepala Sub. Bag	Penata Tingkat I/ Gol. III d	:	1	Orang
	Penata / Gol. III c	:	1	Orang
Staf	Penata Tingkat I / Gol. III d	:	1	Orang
	Penata / Gol. III c	:	3	Orang
	Penata Muda Tk.I/III b	:	3	Orang
	Penata Muda/III a	:	7	Orang
	Pengatur Tk. I/II d	:	1	Orang
	Pengatur / Gol. IIc	:	1	Orang
	Naban	:	3	Orang

**Tabel 1.1.** Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepagawaian	Jenis Kelamin	
		Laki- laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	14
2	Tenaga Bantu (Naban)	3	
	JUMLAH	21	14

## 2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

**Tabel 1.2.** Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

2	Jabatan Fungsional	2	2
3	Sekretariat	9	16
4	Bidang Pertanahan	7	12
5	Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	8	12
6	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	8	10
	Total	35	53

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/ perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai berikut :

**Tabel 1.3.** Daftar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

No.	Jenis	Jumlah yang Ada	Jumlah Ideal
1.	Kendaraan roda empat	5 unit	5 unit
2.	Kendaraan roda dua	12 unit	12 unit
3.	Sepeda	2 unit	2 unit
4.	Roll meter	4 unit	4 unit
5.	Mesin ketik	1 unit	1 unit
6.	Kalkulator	4 unit	4 unit
7.	Almari	17 unit	17 unit
8.	Rak arsip besi	16 unit	16 unit
9.	Rak arsip kayu	14 unit	14 unit
10.	Filling cabinet	15 unit	15 unit
11.	Brand kas	2 unit	2 unit

12.	Almari lerek	9 unit	9 unit
13.	Papan board dinding	10 unit	10 unit
14.	Presensi sidik jari	1 unit	1 unit
15.	Wireless Hotspot	1 unit	1 unit
16.	Almari arsip kayu	14 unit	14 unit
17.	Kursi tamu /zice	4 unit	4 unit
18.	Meja rapat	36 unit	36 unit
19.	Meja telepon	8 unit	8 unit
20.	Meja knap	3 unit	3 unit
21.	Kursi rapat	74 unit	74 unit
22.	Kursi putar	23 unit	23 unit
23.	Kursi kerja	49 unit	49 unit
24.	Kursi lipat	99 unit	99 unit
25.	Meja komputer	6 unit	6 unit
26.	Meja kerja ½ biro	9 unit	9 unit
27.	Meja Counter	3 unit	3 unit
28.	Jam dinding	12 unit	12 unit
29.	AC	12 unit	12 unit
30.	Vacum cleaner	1 unit	1 unit
31.	Kipas Angin	7 unit	7 unit
32.	Tape Recorder	2 unit	2 unit
33.	Wireless	3 unit	3 unit
34.	UPS	17 unit	17 unit
35.	Stabiliser	1 unit	1 unit
36.	Dispenser	4 unit	4 unit
37.	Komputer	25 unit	25 unit
38.	Note book	15 unit	15 unit
39.	Printer	14 unit	14 unit
40.	Harddisk Eksternal	2 unit	2 unit
41.	Scanner	1 unit	1 unit
42.	LCD Proyektor	5 unit	5 unit
43.	Handycam	1 unit	1 unit
44.	Meja kerja biro	15 unit	15 unit
45.	Kamera digital	4 unit	4 unit
46.	Digital Voice Recorder	1 unit	1 unit
47.	LED TV 32"	6 unit	6 unit
48.	Telepon langsung	1 unit	1 unit
49.	Telepon internal	10 unit	10 unit
50.	Meja Kubical	26 unit	26 unit
51.	Almari Es	1 unit	1 unit
52.	HT	2 unit	2 unit
53.	Faximale	1 unit	1 unit

54.	Gedung	1 unit	1 unit
55.	Gudang	1 unit	1 unit
56.	Pompa Air	1 unit	1 unit
57.	Jet Cliner	1 unit	1 unit
58.	Meteran ukur	2 unit	2 unit
59.	Meteran digital	4 unit	4 unit
60.	Sketmat digital	2 unit	2 unit
61.	Kardek besi	1 unit	1 unit
62.	Papan nama instansi	1 unit	1 unit
63.	Backdrop Papan Nama Instansi	1 unit	1 unit
64.	Almari display kaca	2 unit	2 unit
65.	OHP	1 unit	1 unit
66.	Almari Kaca	7 unit	7 unit
67.	Kamera video digital	2 unit	2 unit
68.	Buku	125 buah	125 buah

## 1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.263.041.910,- (Dua puluh enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.2.222.729.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 24.040.312.910,- ( Dua puluh empat milyar empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 24.040.312.910,- yang didukung oleh 6 (Enam) program dan 16 (Enam belas) kegiatan.

## 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

##### **2.1.1. Visi dan Misi**

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :



Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022  
(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2.
		3. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah **Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat, Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dan Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat** dengan indikator capaian sasaran **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

**Visi :**

*“Tertib Pertanahan dan Penataan Ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan”*

**Misi :**

Dengan Visi seperti tersebut diatas maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang.
2. Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan.

**2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

**Tujuan**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 6 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Misi *Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang*, bertujuan untuk mencapai **Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang semakin tinggi.**
2. Misi *Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan*, bertujuan untuk mencapai **Tertib administrasi pertanahan yang semakin meningkat.**

**Sasaran Strategis**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagaimana **Tabel 2.2.** sebagai berikut :

**Tabel 2.2.** Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020
1.	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	%	65,59
2.	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	96,65

Adapun Sasaran Strategis Jangka Menengah yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam kurun waktu enam tahun adalah sebagaimana **Tabel 2.3** sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesesuaian penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90	55,83	64,25	65,59	70,45	81,97
2	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07	92,41	95,00	96,65	97,73	100

### 2.1.3. Strategi Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui beberapa strategi:

- Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang.
- Optimalisasi pengelolaan pertanahan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat didukung oleh program :
  - Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
  - Pengendalian Tata Ruang

Tabel 2.4. Program Pengaturan dan Program Pengendalian Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan Tata Ruang</b>			
1.1	Kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Rancangan Perda RTRW yang telah disempurnakan	1 Dokumen	1 Dokumen
1.2	Kegiatan Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Review Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Kota Yk.	2 Dokumen	0 Dokumen
		Panduan Rancang Kawasan	2 Dokumen	2 Dokumen
1.3	Kegiatan Pembinaan Tata Ruang	Laporan Telaah/Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kajian terkait Pengaturan Tata Ruang	2 Dokumen	0 Dokumen
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>			
2.1	Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	0 Dokumen
		Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi Penyusunan Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang	5 kali	5 kali
2.2	Kegiatan Pengawasan Tata Ruang	Neraca Penatagunaan Udara	1 Dokumen	0 Dokumen
		Monitoring Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	0 Dokumen
		Dokumen SPM dan NSPK	3 Dokumen	3 Dokumen
		Koordinasi Penyusunan Neraca Penatagunaan Udara	2 kali	2 kali
2.3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen

2. Sasaran **Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat** didukung oleh program :  
Pengelolaan Pertanahan sebagaimana tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program Pengelolaan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>			
1.1	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.	Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen
		Permohonan Pembuatan / perubahan peta bidang untuk fasum.	5 bidang	8 bidang
		Pengurusan Permohonan baru / perpanjangan Surat Perjanjian	10 bidang	18 bidang

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
		Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwon Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat		
		Aset tanah yang terdaftar Penseertifikatan Tanahnya.	15 Bidang	5 Bidang
1.2	Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan Tanah Kantor	-	1 lokasi
		Pengadaan tanah untuk RTHP	3 lokasi	5 lokasi
		Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum	-	2 lokasi
		Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.	1 Dokumen	1 Dokumen
		Penilaian Aset Tanah Appraisal	1 Dokumen	3 Dokumen
		Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tanah	3 Dokumen	8 Dokumen
1.3	Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan	1 dokumen	1 dokumen
1.4	Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 Bidang	100 Bidang
		Hasil Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pemasangan Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	120 Buah	120 Buah
1.5	Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Penerbitan Rekomendasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak 750 Rekomendasi.	1 Dokumen	1 Dokumen

Untuk mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan, akan didukung program internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagaimana adalah tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6.** Program Internal

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Makan Minum Koordinasi	121 kali	49 kali
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	18 laporan	7 laporan
1.2	Kegiatan Penyediaan	Surat Dinas yang dikelola	2.000 buah	2.000 buah

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
	Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang	3 Orang
		Alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis	48 Jenis
		Jasa percetakan	6 jenis	3 Jenis
		STNK Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar	17 Unit	17 Unit
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
		Buku perpustakaan	6 Buah	0 Buah
		Bahan Komputer/Printer	6 Jenis	6 Jenis
		Belanja telepon dan bantuan komunikasi	2 Jenis	12 Bulan
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	4 Bulan
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis
		Jasa Penggandaan	80.000 lbr	48.820 lbr
		Jasa Pemeliharaan Komputer	5 Unit	5 Unit
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia.	3 jenis	1 jenis
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan kantor/tempat	1 jenis	1 jenis
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 unit	17 unit
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>			
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan, menengah dan tinggi yang merata serta berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat.

#### 2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

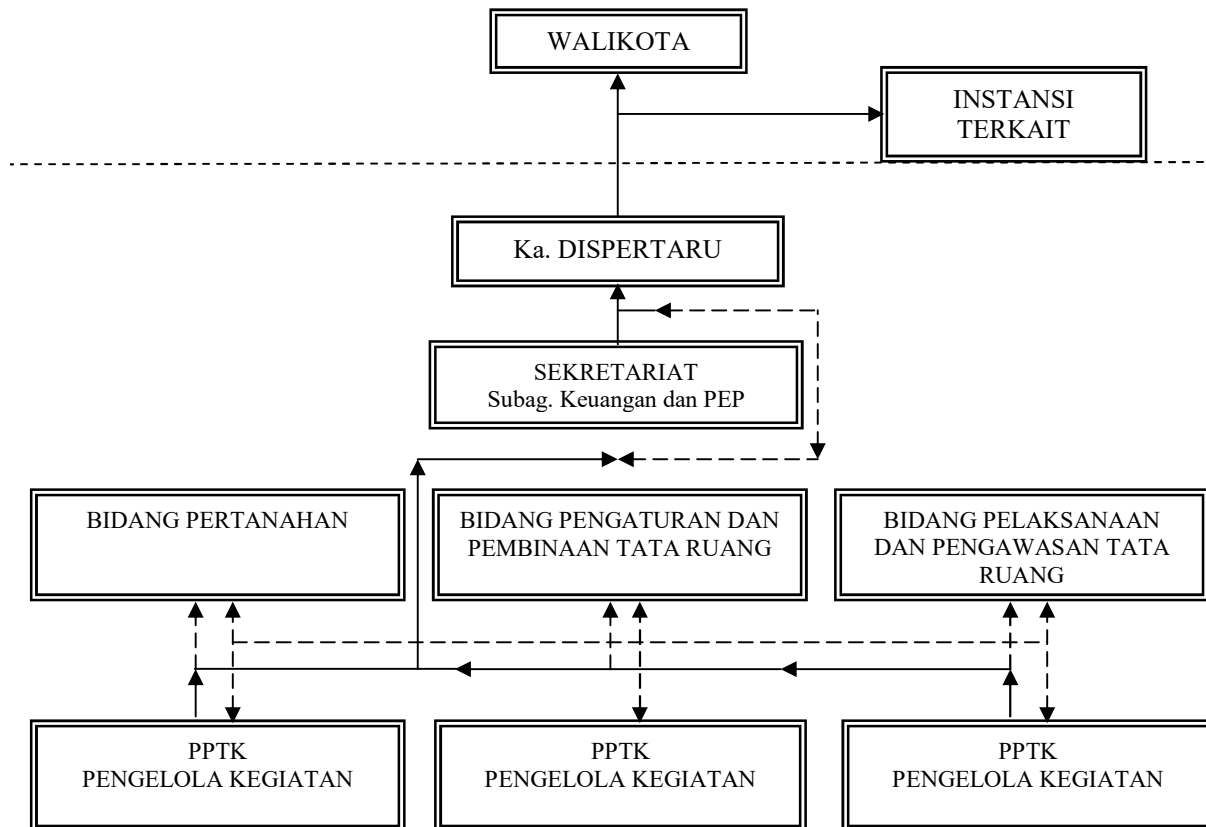
Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sebagaimana adalah tabel 2.7 sebagai berikut:

**Tabel 2.7.** Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama ( Indikator Sasaran )	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1.	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	(50% persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang dihitung dari dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang dikalikan bobotnya.</li> <li>- Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang di hitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pengendalian dan pengawasan tata ruang dikalikan bobotnya.</li> </ul>
2.	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot +34% tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tanah aset pemkot yang bersertifikat.</li> <li>- Total tanah aset pertanahan pemkot.</li> <li>- Jumlah pengadaan tanah pemkot.</li> <li>- Jumlah kebutuhan pangan tanah pemkot.</li> </ul>

## 2.1.5. Sistem Pelaporan dan Koordinasi

### 2.1.5.1. Bagan Sistem Pelaporan, Evaluasi, dan Konsolidasi



Keterangan:

- > Garis pelaporan
- - -> Garis evaluasi dan konsolidasi

### 2.1.5.2. Mekanisme Pelaporan

#### 2.1.5.2.1. Alur Laporan

- Dimulai dari pelaporan kegiatan dalam hal ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Laporan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PPTK yang dibantu oleh Pendukung Administrasi Umum kegiatan dan Pendukung Administrasi Keuangan, dikonsolidasikan dengan Bidang sesuai tugas pokok dan fungsi melalui seksi dan subag, perkembangan kegiatan disampaikan melalui aplikasi SIM pelaporan.
- Sekretariat dalam hal ini Sub. Bag. Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan merekap dan menganalisa, melaporkan sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan.
- Seluruh materi laporan di entrykan di SIM Dalbang oleh Petugas Urusan Pendukung Administrasi Umum.



#### 2.1.5.2.2. Tatakala/ Waktu Pelaporan.

Awal sampai dengan akhir hari dalam bulan yang bersangkutan merupakan waktu pelaksanaan kegiatan. Maksimal tanggal 5 bulan berikutnya laporan tiap bulan dan tribulan harus sudah terkirim menggunakan aplikasi SIM Pelaporan Bagian Pengendalian Pembangunan.

#### 2.1.5.2.3. Metode Pengumpulan Data

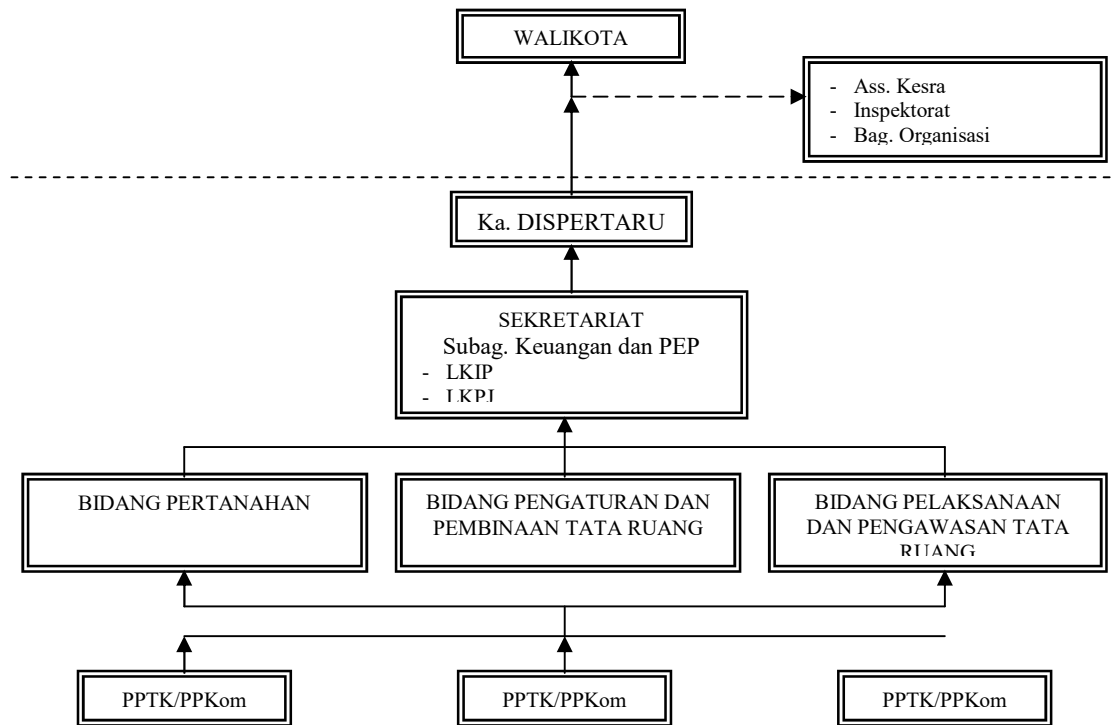
Pengumpulan data dari para petugas urusan Administrasi Umum pada masing-masing kegiatan.

#### 2.1.5.2.4. Evaluasi dan Konsolidasi

- Evaluasi dan konsolidasi dilaksanakan baik lintas PPTK, lintas seksi/Sub Bagian dan lintas bidang secara vertical (baik *top down* maupun *bottom up*) dan secara horizontal maupun diagonal tergantung aspek/materi pembahasan.
- Waktu pelaksanaan evaluasi dan konsolidasi dilakukan dengan rentang waktu bulanan serta insidental tergantung urgensi kasus, bahasan, atau materi.

### 2.1.5.3. Sistem Pedoman Pengumpulan Data Kinerja

#### 2.1.5.3.1. Bagan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja



Keterangan:

→ Alur Pengumpulan data

#### 2.1.5.3.2. Prosedur pengumpulan data kinerja :

- a. PPTK membuat dan melaporkan progres kegiatan kepada Kepala DISPERTARU dengan persetujuan Kepala Bidang, Sekretariat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.
- b. Laporan dihimpun secara elektronik dalam bentuk SIM Dalbang oleh masing-masing PPTK untuk data kinerja dan dihimpun secara elektronik dalam bentuk SIPKD untuk data kinerja keuangan.
- c. Sub Bagian KPEP melaksanakan evaluasi atas laporan yang telah dientry oleh PPTK, apabila ada kesalahan entry/ketidaksamaan data dengan yang ada maka PPTK harus merevisi laporannya melalui SIM Pelaporan.
- d. Sekretariat (Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) merekap, memproses, mengolah laporan-laporan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja.
- e. Draft penyusunan Laporan Kinerja dibahas dalam rapat koordinasi lintas Bidang dan Sekretariat.
- f. Laporan Kinerja Dinas disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Inspektorat.

## 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang meningkat.	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.	70,58
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks tertib administrasi pertanahan	96,86

Pada tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan target pada sasaran strategis Dinas. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9.** Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang meningkat.	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.	65,59
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks tertib administrasi pertanahan	96,65

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Rp. 428.095.562,-	Perubahan APBD
2. Program Pengendalian Tata Ruang	Rp. 76.820.480,-	Perubahan APBD
3. Program Pengelolaan Pertanahan	Rp. 23.083.120.100,-	Perubahan APBD dan BKK DANAIS 2020

Untuk indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, akan dicapai dengan program/kegiatan :

**Tabel 2.10.** Program/Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
<b>I</b>	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	
1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	- Tersedianya Draft Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	- Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.
3	Pembinaan Tata Ruang	- Meningkatnya sinergitas dan keselarasan Pembangunan Kota Yogyakarta dengan tata ruang kota maupun tata ruang keistimewaan.

Untuk indikator Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang, akan dicapai dengan program/kegiatan :

**Tabel 2.11.** Program/Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
<b>I</b>	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>	
1	Pengendalian Tata Ruang	- Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah.
2	Pengawasan Tata Ruang	- Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.
3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	- Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi tata ruang dan pertanahan Kota Yogyakarta

Untuk indikator Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot, akan dicapai dengan program/kegiatan :

**Tabel 2.12.** Program/Kegiatan untuk mendukung pensertifikatan tanah aset Pemkot.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>	
1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	- Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. - Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk Fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk. - Pengurusan Surat Kekancingan yang digunakan oleh Pemkot Yogyakarta - Teridentifikasi dan terverifikasi tanah negara/pemkot yang berada di sepanjang sungai.
2	Penyelesaian Masalah Pertanahan	- Kejelasan status pertanahan
3	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	- Terdaftarnya 100 bidang tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ke BPN Kota Yk. - Data Inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan 75 bidang potensi tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yk.
4	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kaddipaten.	- Persentase pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Sedangkan untuk mencapai Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan dilaksanakan program/kegiatan :

**Tabel 2.13.** Program/Kegiatan untuk mendukung Tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>	
1	Pemanfaatan Pertanahan	- Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta - Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan.

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.969.478.388,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.351.934.000,- dan Belanja Langsung Rp.11.617.544.388,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp.26.263.041.910,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.2.222.729.000,- dan Belanja Langsung Rp.24.040.312.910,-.

#### 2.3.1. Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Perubahan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebesar Rp.26.263.041.910,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.14.** Perubahan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.222.729.000,-	8,47
2	Belanja Langsung	24.040.312.910,-	91,53
<b>Jumlah</b>		<b>26.263.041.910,-</b>	<b>100,00</b>

#### 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang digunakan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15.** Rincian anggaran belanja langsung per sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
<b>I</b>	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>		
<b>A</b>	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>428.095.562</b>	
1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	321.342.682	APBD
2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	76.478.040	APBD
3	Pembinaan Tata Ruang	30.274.840	APBD
<b>B</b>	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>	<b>76.820.480</b>	
1	Pengendalian Tata Ruang	44.862.240	APBD
2	Pengawasan Tata Ruang	577.000	APBD
3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	31.381.240	APBD
<b>II</b>	<b>Tertib administrasi pertanahan meningkat.</b>		
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>	<b>23.083.120.100</b>	
1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	91.619.820	APBD
2	Pemanfaatan Pertanahan	21.678.182.040	APBD
3	Penyelesaian Masalah Pertanahan	73.768.240	APBD
4	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	695.175.000	BKK
5	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.	544.375.000	BKK

Adapun anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program internal dinas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16.** Rincian anggaran program/kegiatan internal :

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
<b>A</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>345.568.688</b>	
1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.078.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	314.490.688	APBD
<b>B</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>45.935.000</b>	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	500.000	APBD
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.435.000	APBD
<b>C</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>60.773.080</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	60.773.080	APBD

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku Perangkat Daerah utama dalam pencapaian sasaran daerah nomor 10 yaitu Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang telah melaksanakan perhitungan atas capaian yang dihasilkan untuk tahun 2020.

Dengan menghitung selisih luas pada masing-masing fungsi tanpa menimbang nilai positif maupun negatifnya dapat dihitung prosentase kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Yogyakarta tahun 2020. Dengan luas total 3.277,18 ha, jumlah luas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 706,01 ha. Dengan demikian dapat dihitung luas simpangan terhadap luas rencana dan dihasilkan prosentase kesesuaian pemanfaatan pola ruang untuk Kota Yogyakarta sebesar 78,46%.

**Tabel. Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020.**

<b>Fungsi</b>	<b>Rencana</b>	<b>Eksisting 2020</b>	<b>Selisih absolut</b>	<b>Selisih (nilai +)</b>
Hunian	1,837.76	1615.50	222.26	222.26
Perdagangan dan Jasa	688.31	641.90	46.41	46.41
Perkantoran	73.22	93.03267	-19.81	19.81
Industri	0.51	9.35	-8.84	8.84
Sarana Pendidikan	89.02	183.76	-94.73	94.73
Sarana Kesehatan dan Agama	18.57	59.47	-40.90	40.90
Sarana OR dan Rekreasi	10.28	13.90	-3.63	3.63
Sarana Transportasi	42.47	39.30	3.17	3.17
Pariwisata	87.08	39.54	47.54	47.54
Cagar Budaya	59.78	25.56	34.22	34.22
RTH	38.85	47.64	-8.79	8.79
RTH Khusus	22.82	24.05	-1.23	1.23
Sempadan Sungai	23.42	33.65	-10.23	10.23
Sungai	25.74	38.39	-12.65	-12.65
Jalan	259.17	247.20	11.97	11.97
Lahan kosong		75.19	-75.19	75.19
Sawah		43.70	-43.70	43.70
Tanah produktif		46.05	-46.05	46.05
<b>TOTAL</b>	<b>3,277.01</b>	<b>3277.18</b>		<b>706.01</b>
			<b>Ketidak Sesuaian</b>	<b>21.54</b>
			<b>Kesesuaian</b>	<b>78.46</b>

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	65,59	65,59	100 %
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	96,65	97,12	100,49 %

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada Tahun 2020, semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (tercapai  $\geq 100\%$ ) dari total indikator.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:



### 3.2.1. Sasaran 1: Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

Tabel. 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formula Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	(50%Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50%Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program/kegiatan :

**Tabel 3.4.** Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	65,59	65,59	100%
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	72,00%	72,00%	100%
	- Pengaturan Tata Ruang 1. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci - Rancangan Perda RTRW yang telah disempurnakan.	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - Panduan Rancang Kawasan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	- Pembinaan Tata Ruang 1. Pembinaan Tata Ruang - Laporan telaah/Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang	56,50	56,50%	100%
	- Pengendalian Tata Ruang 1. Pengendalian Tata Ruang - Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang - Koordinasi Penyusunan Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang.	1 dokumen 5 kali	1 dokumen 5 kali	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Tata Ruang               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Tata Ruang                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).</li> <li>- Koordinasi Penyusunan Neraca Penagunaan Udara Ruang.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 dokumen</p> <p style="text-align: center;">2 kali</p>	<p style="text-align: center;">1 dokumen</p> <p style="text-align: center;">2 kali</p>	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi Tata Ruang               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang</li> </ul> </li> </ul>			100%

- Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

$$K1 = \frac{\sum \text{persentase realisasi target kinerja}}{3} \times \text{target kinerja}$$

$$K1 = \frac{(100\%+100\%+100\%)}{3} \times 74,18 \% = 74,18\%$$

- Program Pengendalian Tata Ruang

$$K2 = \frac{\sum \text{persentase realisasi target kinerja}}{3} \times \text{target kinerja}$$

$$K2 = \frac{(100\%+100\%+100\%)}{3} \times 57,00 \% = 57,00 \%$$

Capaian indikator sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

$$K = \frac{K1 + K2}{2}$$

$$K = \frac{74,18 + 57,00}{2} = 65,59$$

**Tabel 3.5.** Target dan realisasi kinerja indikator sasaran

No	Indikator	Capaian 2017	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90	65,59%	65,59%	100%	81,97	80,02%

3.1.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020;

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja APBD level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

- b. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:
- a. Pengukuran kinerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran kinerja.
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan APBD data hasil Pengukuran kinerja dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Target kinerja pada tahun 2020 sebesar 65,59% dan terealisasi sebesar 65,59%. Dengan demikian, pencapaian target kinerja dapat terpenuhi 100%.

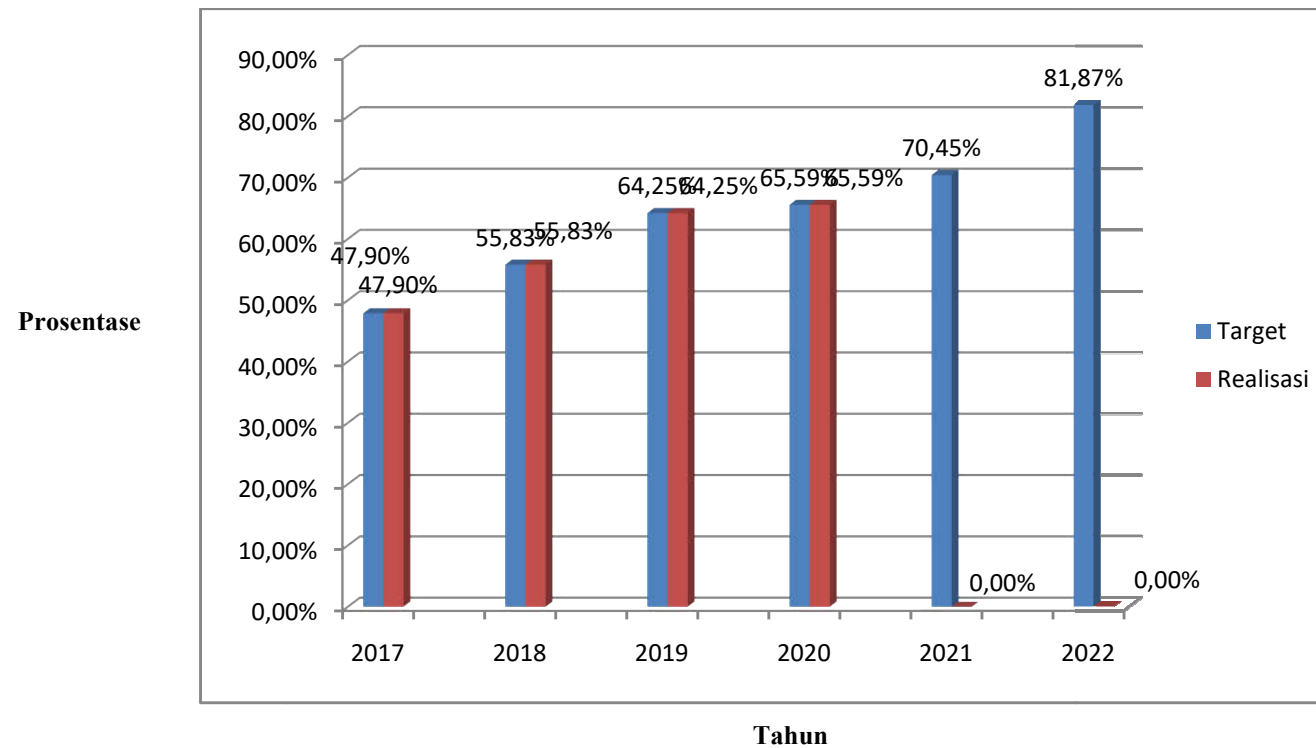
3.1.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga masa Renstra 2017 – 2022 dimana kinerjanya dapat mencapai 100%.

**Tabel 3.6.** Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90%	47,90%	55,83%	55,83%	64,25%	64,25%	65,59%	65,59%	77,25%	0,00%	81,87%	0,00%

**Grafik 1.** Target dan realisasi sasaran terlaksananya kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat



3.1.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2020 yang merupakan tahun keempat Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 65,59%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 80,02%.

3.1.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

3.1.1.5. Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut ;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

3.1.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat yaitu:

1. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang yang meliputi kegiatan:
  - Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
  - Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
  - Pembinaan Tata Ruang

Indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dapat tercapai 100%



2. Program Pengendalian Tata Ruang yang meliputi kegiatan:
  - Pengendalian Tata Ruang
  - Pengawasan Tata Ruang
  - Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang

Indikator Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang dapat tercapai 100%

### 3.2.2. Sasaran 2: Tertib administrasi pertanahan meningkat.

Tabel. 3.7. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formula Indikator
Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program/kegiatan :

**Tabel 3.8.** Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	96,65%	97,12%	100,49%
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.	96,93 %	97,13 %	100,21%
	- Administrasi Pertanahan			
	1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan			81,25%
	- Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Permohonan pembuatan/perubahan peta bidang untuk fasum	8 Bidang	5 bidang	
	- Pengurusan permohonan baru/perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Keraton Ngayogyakarta Hdningrat	18 Bidang	15 bidang	
	- Aset Tanah yang terdaftar pensertifikatan tanahnya.	5 Bidang	5 bidang	
	2. Penyelesaian Masalah Pertanahan			100%
	- Penyelesaian masalah pertanahan			
	3. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			100%
	- Pendaftaran Tanah Kasultanan	100 Bidang	100 Bidang	
	- Hasil Identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Pemasangan Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Kadipaten Di Kota Yogyakarta	120 Buah	120 Buah	
	4. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.			100%
	- Penerbitan Rekomendasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak 750 Rekomendasi.	1 Dokumen	1 Dokumen	

	<b>Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan</b>	<b>97,12%</b>	<b>97,09 %</b>	<b>101,01%</b>
	- Administrasi Pertanahan (Pengadaan Tanah)			
	1. Pemanfaatan Pertanahan			100%
	- Pengadaan tanah pembangunan kantor kelurahan	1 lokasi	1 lokasi	
	- Pengadaan tanah untuk RTHP	5 lokasi	5 lokasi	
	- Pengadaan tanah untuk Jalan/Fasum	2 lokasi	2 lokasi	
	- Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara	1 dokumen	1 dokumen	

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program Pengelolaan Pertanahan yang meliputi dua indikator kinerja program yaitu:

1. Indikator **Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot**, didukung oleh lima kegiatan:

- Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan
- Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan
- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Penghitungan capaian kinerja Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot Tahun 2020 diukur atas dasar diperolehnya :

- Bukti Pembayaran (BP) pendaftaran pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Sebagai output target Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dan Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan.

Jika dokumen diatas terpenuhi maka capaian kinerja 100%.

2. Indikator **Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan**, didukung oleh kegiatan Pemanfaatan Pertanahan.

Penghitungan capaian kinerja Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan Mengacu kepada terpenuhinya tahapan proses pengadaan tanah yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, proses appraisal sampai dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan atau pembayaran.

kinerja diperhitungkan tercapai 100% apabila telah sampai proses pelaksanaan musyawarah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam :

1. SK Tim Pelaksana Kegiatan
2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
3. Dokumen Appraisal
4. Berita Acara Proses Musyawarah.

Perhitungan capaian sasaran kinerja Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$K = \frac{(\text{persentase realisasi pensertifikatan tanah aset pemkot} \times 66\%)^1 + (\text{persentase realisasi tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah} \times 34\%)^2}{2}$$

$$K = \frac{(97,13\% \times 66\%) + (97,09\% \times 34\%)}{2} = 97,12 \%$$

- 1) Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot diperoleh dari persentase capaian realisasi terhadap target pada output Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dan Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan sesuai dengan metadada penyusunan Renstra OPD 2017-2022.
- 2) Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan diperoleh dari persentase realisasi proses administrasi pengadaan tanah yang meliputi persiapan, perencanaan, appraisal, dan musyawarah pada kegiatan Pemanfaatan Pertanahan sesuai dengan metadada penyusunan Renstra OPD 2017-2022.

**Tabel 3.9.** Target dan realisasi Kinerja

No	Indikator	Capaian 2017	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07	96,65	97,12	100,49%	100	97,12%

**3.2.2.1.** Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020;

Target kinerja pada tahun 2020 sebesar 96,65, dan terealisasi sebesar 97,12  
 Dengan demikian, pencapaian target kinerja dapat terpenuhi 100,49%.

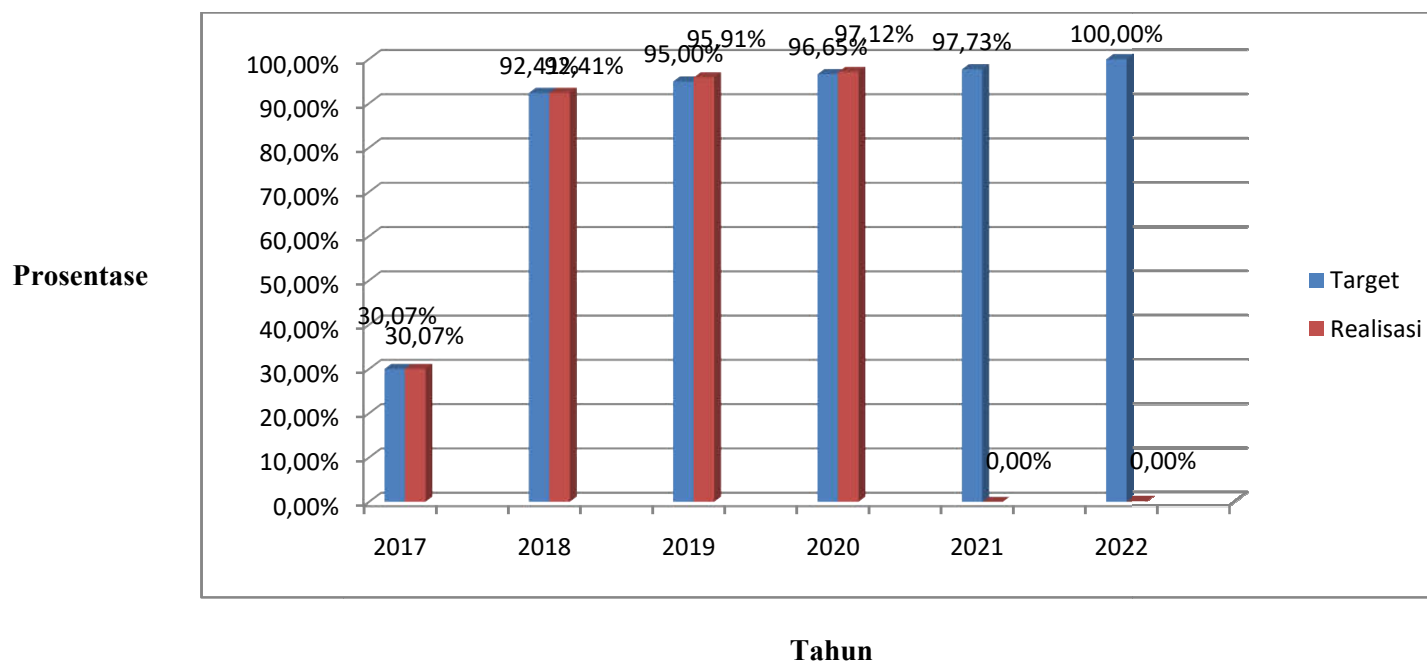
**3.2.2.2.** Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tahun 2020 merupakan tahun keempat masa Renstra 2017 – 2022 dimana kinerjanya dapat mencapai 100,49%.

**Tabel 3.10. Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07%	30,07%	92,41%	92,41%	95,00%	95,91%	96,65%	97,12%	98,79%	0,00%	100%	0,00%

Grafik 2. Target dan realisasi sasaran terlaksananya Tertib administrasi pertanahan meningkat.



**3.2.2.3.** Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2020 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 96,65. Target kinerja tersebut dapat tercapai 100,49% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 97,12%.

**3.2.2.4.** Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

**3.2.2.5.** Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut ;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai yang terbatas dan terdapat kekosongan pegawai pada beberapa jabatan teknis. Namun seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

**3.2.2.6.** Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Program Pengelolaan Pertanahan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tertib administrasi pertanahan meningkat meliputi kegiatan:

1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
2. Pemanfaatan Pertanahan
3. Penyelesaian Masalah Pertanahan
4. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
5. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Mendukung pencapaian indikator Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot 100%. Yang dihitung dari output Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap target pada Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.

#### 6. Pemanfaatan Pertanahan

Mendukung pencapaian indikator Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan 100%.

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Lainnya

Dalam Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendukung dan terlibat dalam Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi tanah yang sudah keluar Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakainya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1980-an (Tanah KPTS).

Untuk tanah KPTS sendiri di Kota Yogyakarta terdapat 2.570 (Dua ribu lima ratus tujuh puluh) bidang terdiri dari :

- Hak Pakai sebanyak 587 (Lima ratus delapan puluh tujuh) bidang.
- Hak Guna Bangunan sebanyak 1.982 (Seribu sembilan ratus delapan puluh dua) bidang.
- Hak Guna Bangunan (HGB) KPTS BPN sebanyak 1 (satu) bidang.

Untuk Tahun 2020 ini inventarisasi dan identifikasi akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan melibatkan BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan wilayah. Adapun jumlah yang akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk tahun ini sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) bidang.

### 3.4. Capaian Kinerja Internal

Untuk Pengukuran kinerja internal teralokasikan dalam 3 program kegiatan internal yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan di Sekretariat dengan anggaran belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 345.568.688,00, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dengan anggaran Rp 45.935.000,00. dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp 60.773.060,00. Program-program tersebut semua dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi fisik mencapai 100 %.



### **3.5. Akuntabilitas Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 85,16 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 84,00%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,02%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan (99,34%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat (83,67%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.11.** Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	65,59	65,59	100,00%	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	428.095.562,00	425.159.227,00	99,31
						Pengendalian Tata Ruang	76.820.480,00	76.403.760,00	99,46
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	96,65	97,12	100,49%	Pengelolaan Pertanahan	23.083.120.100,00	19.312.753.219,00	83,67

Tabel 3.12 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	100	99,34	0,66%
2.	Tertib administrasi Pertanahan Meningkatkan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100,96	83,67	17,29%

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

### Analisis Efisiensi

Penyerapan anggaran yang belum optimal pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat disebabkan karena adanya proses musyawarah harga yang mendasarkan pada harga hasil appraisal sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Pada sasaran kinerja Penyelenggaraan penataan ruang meningkat yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Tata Ruang, seluruh kegiatan dan pekerjaan pada kedua program tersebut dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan memanfaatkan anggaran sebesar 99,34 % karena adanya efisiensi anggaran.

Pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat yang didukung oleh program Pengelolaan Pertanahan, realisasi anggaran mencapai 83,67%. Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan karena adanya proses musyawarah harga yang mendasarkan pada harga hasil appraisal sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Pada Program-program yang mengampu sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat, deviasi terjadi terutama disebabkan oleh proses administrasi pencairan termijn yang cukup lama sehingga berimbas pada penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sedangkan pada program yang mengampu sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat, deviasi yang besar terjadi karena adanya Refocusing anggaran pada bulan April dan untuk pengadaan tanah baru dianggarkan kembali pada anggaran perubahan serta adanya proses musyawarah harga yang mendasarkan pada harga hasil appraisal. Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ke depan perlu ditingkatkan lagi agar realisasi keuangan bisa disesuaikan dengan plotting target anggaran pada tiap tribulannya. Perencanaan pencapaian target/output

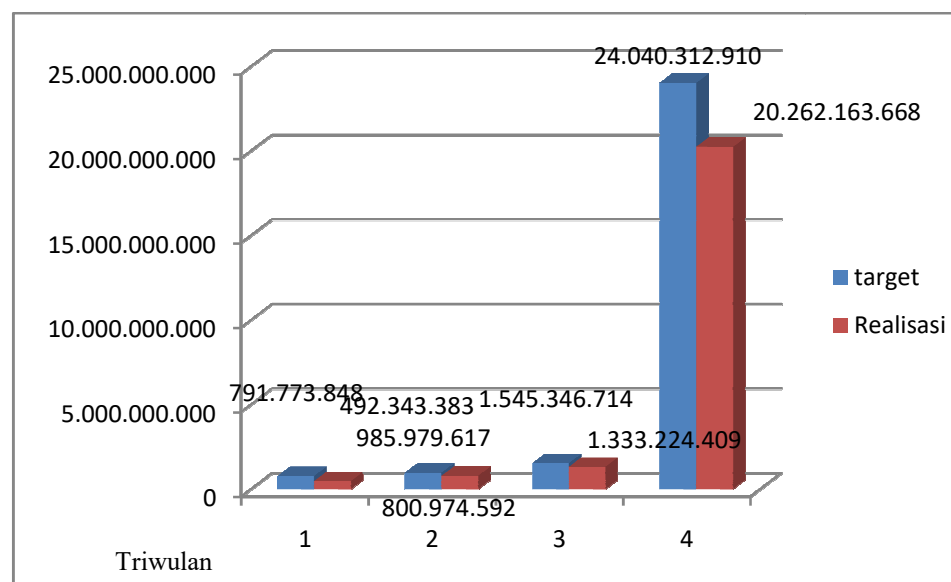
kegiatan/pekerjaan dan perencanaan plotting anggarannya yang sesuai dapat mengurangi potensi deviasi yang cukup besar. Namun demikian, untuk pekerjaan pengadaan tanah, potensi deviasi yang besar kemungkinannya akan selalu ada mengingat harga tanah hasil appraisal dan permintaan harga tanah dari pemilik tanah bisa sangat berbeda.

**Tabel 3.13.** Realisasi Keuangan per Triwulan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.835.918	95.329.909	74,57	196.015.650	192.759.415	98,34	254.245.952	249.294.274	98,05	345.568.688	343.628.472,00	99,44
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	51.192.000	20.398.350	39,85	28.055.000	27.916.050	99,50	28.055.000	27.916.050	99,50	45.935.000	43.534.050,00	94,77
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.379.680	12.206.060	98,60	27.159.200	27.097.580	99,77	41.585.720	41.524.100	99,85	60.773.080	60.684.940,00	99,85
4	Program Pembinaan Tata Ruang	186.724.020	78.007.862	41,78	264.032.742	160.813.642	60,91	392.242.522	372.447.967	94,95	428.095.562	425.159.227,00	99,31
5	Program Pengendalian Tata Ruang	22.564.580	19.269.680	85,40	42.940.400	37.566.400	87,48	57.366.920	51.992.920	90,63	76.820.480	76.403.760,00	99,46
6	Program Pengelolaan Pertanahan	391.077.650	267.131.522	68,31	427.776.625	354.821.505	82,95	771.850.600	590.049.098	76,45	23.083.120.100	19.312.753.219,00	83,67
	Jumlah	791.773.848	492.343.383	62,18	985.979.617	800.974.592	81,24	1.545.346.714	1.333.224.409	86,27	24.040.312.910	20.262.163.668,00	84,28

Gambar 3. Grafik Realisasi Keuangan Per Triwulan

Anggaran



### 3.6. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2020 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

#### 1. Penyempurnaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU)

Pembuatan sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui handphone berbasis android dan komputer sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi.

#### 2. Penyempurnaan Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA)

Pembuatan sistem aplikasi mengenai informasi tanah kasultanan dan kadipaten untuk mengetahui sebaran tanah-tanah kasultanan dan kadipaten baik yang sudah memiliki alas hak maupun belum.

#### 3. Pembuatan aplikasi Bank Tanah

Pembuatan sistem aplikasi basis data pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memuat data usulan pengadaan dan hasil pengadaan tanah sehingga memudahkan dalam merencanakan dan rekapitulasi hasil pengadaan tanah secara cepat dan efektif.

#### 4. Fasilitasi Perubahan Peta Bidang Persil Tanah Masyarakat untuk Fasilitas Umum.

Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk perubahan peta bidang persil yang masih menyatu dengan fasum berupa pembebasan biaya dan semua proses pengurusan perubahan peta bidang ditangani oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

#### 5. Sistem Panduan Rancang (SIMPANCANG)

Pembuatan Sistem Informasi mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sehingga mudah diakses dan dapat dijadikan acuan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Yogyakarta.

## **6. Bintang Srawung Kota**

Merupakan kumpulan kegiatan atau gerakan yang melibatkan stakeholder dengan berbagai media dan metode yang memungkinkan penyampaian informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai tata ruang. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta.

## **7. Pertanahan Istimewa**

Penanganan pertanahan pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten selama ini memerlukan proses waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran dalam penanganan permasalahan pertanahan khususnya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Melalui aksi perubahan ini mengusulkan penanganan permasalahan pertanahan pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten melalui Dana Keistimewaan. Dengan adanya dukungan anggaran keistimewaan penanganan permasalahan lebih optimal dan dapat terselesaikan lebih cepat.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2020 adalah sangat baik dengan capaian kinerja sasaran mencapai 100%.

**Tabel 4.1.** Realisasi pencapaian sasaran strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	65,59	65,59	100%
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	96,65	97,12%	100,49%

Sedangkan untuk dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 26.263.041.910,00. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.366.066.635,00 (85,16%). Tidak optimalnya penyerapan anggaran merupakan imbas dari adanya proses musyawarah harga yang mendasarkan pada harga hasil appraisal sehingga terjadi efisiensi anggaran. Rincian realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.2.** Realisasi Anggaran

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp	%
<b>A</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>26.263.041.910,00</b>	<b>22.366.066.635,00</b>	<b>85,16</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.222.729.000,00</b>	<b>2.103.902.967,00</b>	<b>94,65</b>
<b>C</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>24.040.312.910,00</b>	<b>20.262.163.668,00</b>	<b>84,29</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	345.568.688,00	343.628.472,00	99,44
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	45.935.000,00	43.534.050,00	94,77
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.773.080,00	60.684.940,00	99,85
4	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	428.095.562,00	425.159.227,00	99,31
5	Program Pengendalian Tata Ruang	76.820.480,00	76.403.760,00	99,46
6	Program Pengelolaan Pertanahan	23.083.120.100,00	19.312.753.219,00	83,67

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

**A. Keberhasilan :**

Capaian sasaran strategis dapat tercapai 100% didukung oleh:

1. Terciptanya etos kerja dan komitmen dari pegawai
2. Adanya koordinasi internal dinas yang cukup sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

**B. Hambatan:**

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemui beberapa hambatan antara lain:

1. Kuantitas SDM yang belum memadai.
2. Kesamaan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ternyata belum begitu sejalan dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Adanya pandemi Covid 19 sehingga kegiatan-kegiatan survey lapangan tidak dapat dilaksanakan.
4. Lamanya waktu proses pembahasan dan perolehan persetujuan substansi Raperda RTRW di Kementrian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Lama waktu proses pensertifikatan tanah dalam hal pensertifikatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak bisa diprediksi.

6. Lama waktu proses kekancingan tanah dalam hal pengurusan Surat Kekancingan atas aset yang digunakan oleh Pemkot berkaitan dengan KHP Wahono Sarto Kriyo tidak bisa diprediksi.
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan tanah persil masyarakat.

**C. Antisipasi:**

1. Penambahan kuantitas SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Pengayaan informasi dan peningkatan terhadap pemahaman aturan-aturan yang digunakan dari seluruh Perangkat Daerah terkait.
4. Kegiatan Survey lapangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu penggunaan peta digital beserta aplikasi lain yang mendukung.
5. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar segera dilakukan pembahasan Raperda RTRW.
6. Mengintensifkan koordinasi untuk percepatan proses kekancingan.
7. Mengintensifkan diseminasi ke masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan persil tanah masyarakat.
8. Melakukan proses percepatan pengadaan tanah untuk meminimalisir kegagalan pengadaan tanah.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Tahun Anggaran 2020. Untuk tahun-tahun mendatang kiranya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) selalu mohon dukungan semua pihak dalam mewujudkan Visi, Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2021  
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo H.P., ST., MA., MTP.  
NIP. 19720411 199803 1 007

**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Struktur Organisasi

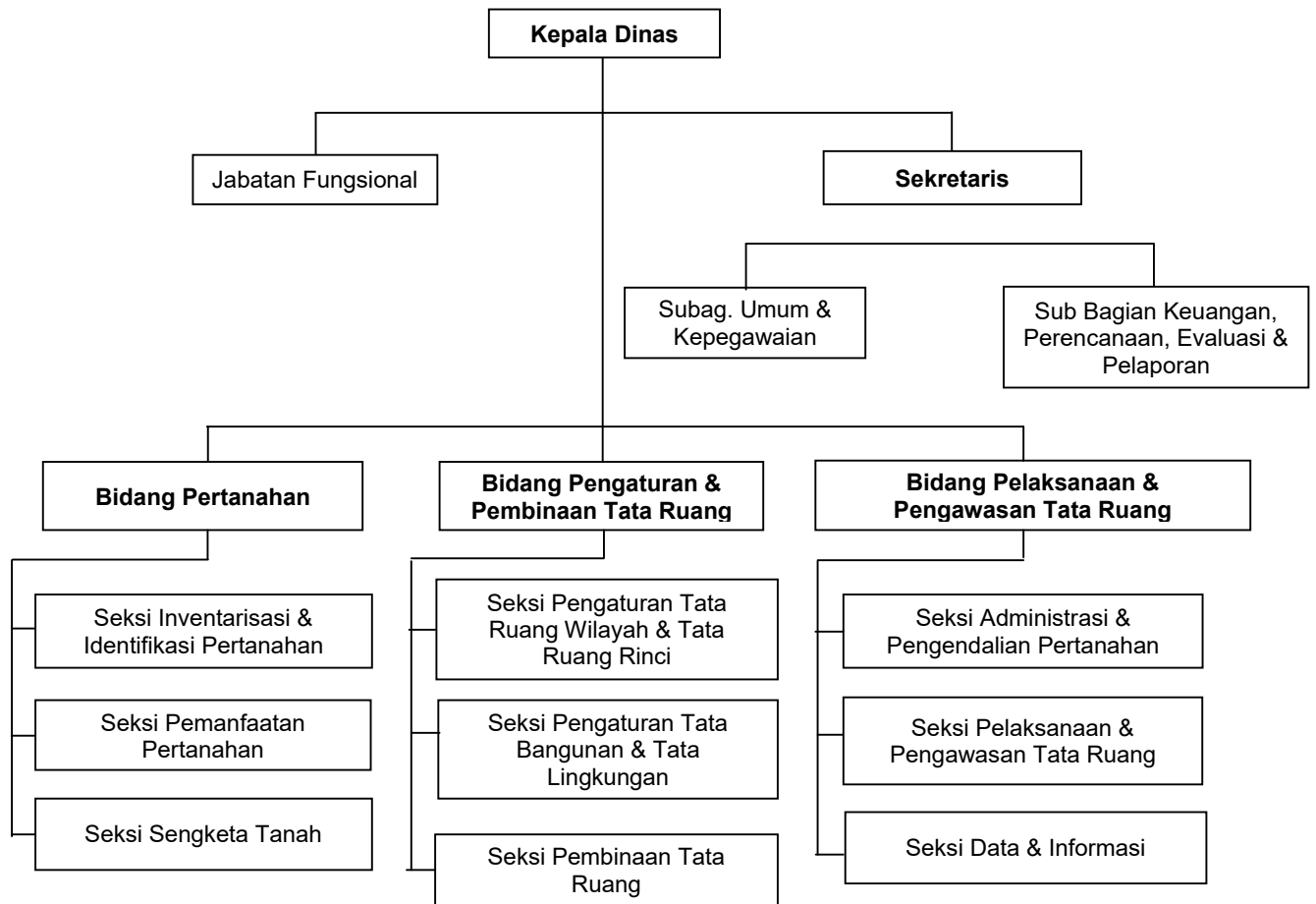
Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KOTA YOGYAKARTA





Lampiran : 2

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682  
Fax (0274) 555241; EMAIL : [pertanahantataruang@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruang@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**PERENCANAAN STRATEGIS**  
**TAHUN 2017 – 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesesuaian penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90	55,83	64,25	65,59	70,45	81,97
2	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07	92,41	95,00	96,65	97,73	100



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682  
Fax (0274) 555241; EMAIL : [pertanahantataruang@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruang@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menyusun Jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra maupun dokumen perencanaan yang lain secara periodik.	Menyusun SOP Review Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Nomor 188/3108/KEP/2020 tentang Penetapan Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
2.	Mereview mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan mekanisme apabila terjadi kesalahan data kinerja.	Mereview SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan memperhatikan mekanisme apabila terjadi kesalahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Nomor 188/3108/KEP/2020 tentang Penetapan Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
3.	Menyajikan IKU telah ditetapkan yang disajikan dalam pelaporan kinerja.	Menyajikan IKU sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 342 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaporan kinerja.

Kepala

Wahyu Handoyo H.P., ST., MA., MTP.  
NIP. 19720411 199803 1 007



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682  
Fax (0274) 555241; EMAIL : [pertanahantataruang@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruang@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Asal : Badan Informasi Geospasial (BIG).  
Perihal : Bhumandala Rajata untuk Simpul Jaringan Informasi Geospasial terbaik  
Kedua dan Bhumandala Kencana untuk Geoportal terbaik Pertama.  
Tanggal : 27 November 2020.

Kepala

Wahyu Handoyo H.P., ST., MA., MTP.  
NIP. 19720411 199803 1 007